

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA TANGERANG

Pitri Yandri

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sosial Ekonomi (P3SE)

STIE Ahmad Dahlan Jakarta

E-mail: p.yandri@gmail.com

Abstract

This paper analyzes public perception of education public service before and after the implementation of regional autonomy policy. The values examined in this paper used Fisher Exact Value Test. The results of the study show that public perception of education public service in central city as well as in suburb are equal. There is no perception difference about education public service between before and after the implementation of autonomy policy. Although the public perception of public service education has been uneven, policies to improve access of the poor and people who are vulnerable to poverty to education to be important to implement. It aims to improve people's lives, especially the poor.

Keywords: *Autonomy, decentralization, public service, education, fisher exact*

Abstrak

Makalah ini menganalisis persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik pendidikan sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Makalah ini menggunakan Fisher Exact Value Test sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik pendidikan di pusat kota maupun di pinggiran kota adalah sama. Tidak ada perbedaan persepsi tentang pelayanan publik bidang pendidikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan otonomi. Meskipun persepsi publik tentang pelayanan publik bidang pendidikan telah merata, kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dan masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan terhadap pendidikan menjadi penting untuk dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Kata kunci: *Otonomi, desentralisasi, pelayanan publik, pendidikan, fisher exact*

Kota Tangerang secara geografis sangat strategis. Terletak di Provinsi Banten, Indo-

nesia, tepat di sebelah barat kota Jakarta, serta dikelilingi oleh Kabupaten Tangerang

di sebelah selatan, barat, dan timur. Luas wilayah mencapai 164,54 km² dengan 13 kecamatan. Ketiga belas kecamatan tersebut adalah: Tangerang, Jatiuwung, Batucapeper, Benda, Cipondoh, Ciledug, Karawaci, Periuk, Cibodas, Neglasari, Pinang, Karang Tengah dan Larangan. Dahulu, Kota Tangerang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tangerang, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, dan akhirnya ditetapkan sebagai kotamadya pada tanggal 27 Februari 1993 berdasarkan UU/No. 2/1993 tentang Pembentukan Kotamadya Tangerang. Sebutan "kotamadya" diganti dengan "kota" pada tahun 2001.

Sebagai akibat dari wilayah pinggiran (*hinterland*), Kota Tangerang dihadapkan pada permasalahan khas wilayah urban. Salah satu permasalahan tersebut adalah tumbuh-kembangnya kawasan industri yang disamping memberi dampak positif berupa penyerapan tenaga kerja juga memberi dampak negatif, khususnya eksternalitas (sampah, pencemaran udara dan lain sebagainya) dan tingginya angka migrasi. Data BPS Kota Tangerang menunjukkan, dari tahun 2000-2007, Kota Tangerang terus mengalami pertumbuhan penduduk. Dari 1.311.746 jiwa pada tahun 2000 menjadi 1.575.140 jiwa pada tahun 2007. Pada 2010, jumlah ini meningkat menjadi 1.797.715 jiwa. Besarnya arus migrasi yang tidak diikuti oleh ketersediaan lapangan kerja membuat masalahnya menjadi semakin kompleks.

Kondisi tersebut jelas membutuhkan penanganan yang komprehensif dari Pemerintah Daerah, sebab ketika pertambahan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan pertambahan jumlah fasilitas dan sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada, maka pertambahan jumlah penduduk

yang tidak terkendali akan menurunkan derajat hidup dari masyarakat di daerah tersebut. Salah satu pendekatan yang telah ditempuh adalah pendekatan otonomi daerah dan desentralisasi. Di Indonesia, kerangka otonomi daerah dan desentralisasi ini telah diatur melalui UU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU. No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Studi dampak otonomi daerah telah banyak dilakukan dan menghasilkan simpulan yang bervariasi. Variasi simpulan ini menunjukkan bahwa otonomi daerah belum memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat (Usman, 2005; Arifin, 2006, Rozi, 2007; Hernawan, 2007). Meski demikian, terdapat pula pandangan positif yang menyatakan bahwa otonomi daerah telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Lewis, 2001; Siregar, 2001; Elmi, 2005; Nanga, 2006, Wilopo dan Budiono, 2007).

Namun demikian, hasil studi yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik di era otonomi daerah belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Studi Toyamah, et al (2002) menemukan bahwa setelah pelaksanaan otonomi daerah pelayanan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur belum berubah, namun kondisi sarana dan prasarana pendukung pelayanan cenderung memburuk. Bappenas dan UNDP (2008) juga menemukan banyak daerah belum secara optimal menyediakan pelayanan dasar (*basic service*) kepada masyarakat sehingga berimplikasi pada ketimpangan tingkat kesejahteraan nonpendapatan di daerah.

Studi World Bank (2009) juga menemukan bahwa hampir 25% kondisi infrastruktur pendidikan di sejumlah daerah sangat rendah. Studi World Bank menun-

unjukkan, ada perbedaan mencolok antara capaian jenjang pendidikan penduduk di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan, dengan perbedaan rata-rata sebesar 2,5 tahun (World Bank, 2006). Ketimpangan ini terjadi di Kota Tangerang. Data BPS Kota Tangerang menunjukkan, pada bidang pendidikan, Angka Partisipasi Murni (APM) memang mengalami peningkatan. Tetapi pada masing-masing jenjang terdapat perbedaan APM. Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA lebih rendah dibanding SD/MI yaitu 85,25 pada SD/MI, 55,33 pada SMP/MTs dan 23,87 pada SMA/MA.

Jika hipotesis bahwa otonomi daerah mampu mendorong kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, maka dugaan ini harus dibuktikan. Hal ini menjadi beralasan, sebab sebelas tahun pelaksanaan kebijakan otonomi daerah haruslah memberi dampak pasti terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah. Berdasar pada uraian itu, artikel ini mengkaji persepsi masyarakat tentang pelayanan publik bidang pendidikan sebelum dan setelah pelaksanaan otonomi daerah di Kota Tangerang.

Bidang pendidikan ini menjadi penting dikaji. Sebab bidang ini dianggap krusial dalam upaya mendorong kapabilitas manusia (*human capital*) dan oleh karena itu pemerintah di negara-negara berkembang terus berupaya untuk meningkatkan anggaran terhadap kedua bidang ini. (Morrison, 2002). Studi Burchi (2006) menemukan bahwa pendidikan berkontribusi terhadap upaya 'perlawanan' terhadap kerentanan pangan di wilayah pedesaan di negara-negara berkembang dan dengan demikian merupakan kunci ketahanan pangan wilayah tersebut. Studi Suryadarma dan Surhayadi (2009) juga menemukan bahwa pendidikan, khususnya pendidikan dasar (SMP)

terbukti nyata secara statistik berefek negatif terhadap kemiskinan.

Metode Penelitian

Kombinasi kualitatif dan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian di Kota Tangerang. Dua alasan penting mengapa Kota Tangerang diambil sebagai lokasi penelitian: (1) Kota Tangerang merupakan daerah penyangga (*hinterland*) Provinsi DKI Jakarta yang secara demografis terus mengalami pertumbuhan penduduk. (2) melihat kecenderungan tersebut, Kota Tangerang membutuhkan pelayanan publik yang memadai. Waktu penelitian dilakukan pada Juli 2010 sampai dengan Februari 2011.

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan sampel *purposive/judgement sampling*. Dipilih 30 responden yang dianggap mewakili yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Tangerang. Responden dipilih yang dianggap mewakili populasi. 30 responden dianggap telah sesuai dengan Dalil Limit Pusat (*Central Limit Theorema*) yang menyatakan bahwa apabila X_1, X_2, \dots, X_n merupakan variabel acak dari populasi (dalam hal ini, distribusi probabilitas) manapun dengan rata-rata μ_x dan varians σ_x^2 , maka rata-rata sampel cenderung terdistribusi secara normal dengan rata-rata μ_x dan varians $\frac{\sigma_x^2}{n}$ ketika ukuran sampel naik hingga tak terhingga. Jika X_i diasumsikan berasal dari populasi normal, maka rata-rata sampel akan mengikuti distribusi normal tanpa peduli terhadap ukuran sampel. Dalam prakteknya, terlepas distribusi probabilitas apapun yang mendasarinya, rata-rata sampel dari besaran sampel yang terdiri dari sekurang-kurangnya 30 observasi akan mendekati normal.

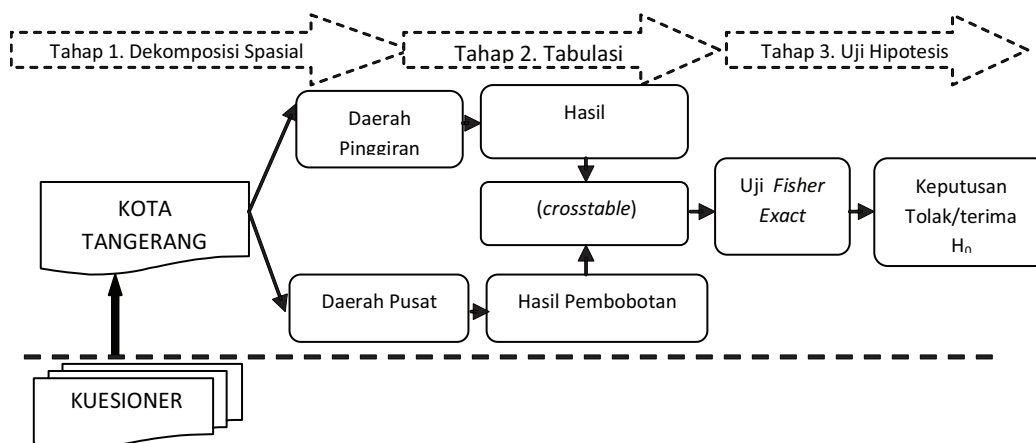
Rencana wilayah pengambilan sampel di Kota Tangerang dibagi menjadi wilayah pusat kota dan pinggiran kota. Definisi wilayah kota (inti) ditandai oleh kepadatan yang sangat tinggi, meliputi kepadatan penduduk, gedung-gedung bertingkat mencakar ke langit, kepadatan berbagai jenis bisnis, ekonomi dan keuangan, kepadatan lalu lintas perkotaan, tingkat polusi udara dan kebisingan yang tinggi. Sebaliknya, wilayah pinggiran ditandai oleh lahan perkotaan yang luas yang tingkat kepadatan penduduk, bangunan, berbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang relatif rendah serta polusi dan tingkat kebisingan yang rendah (Friedman dalam Adisasmita, 2006).

Di Kota Tangerang, secara geografis dan demografis wilayah pusat kota di Kota Tangerang merupakan wilayah yang kondisi sosial ekonomi penduduknya relatif sejahtera. Sementara wilayah pinggiran kota di Kota Tangerang merupakan wilayah yang kurang sejahtera atau bahkan miskin. Wilayah pinggiran yang kurang sejahtera atau miskin ini banyak dihuni oleh masyarakat *squatter* (kumuh). Beberapa wilayah *squatter* (kumuh) berdasarkan studi Pakkanna (2007) terletak antara lain di Kelurahan Babakan dan Kelurahan Kedaung

Wetan (KW)-Kecamatan Neglasari, serta Kelurahan Mekarsari-Kecamatan Tangerang Kota.

Teknik analisis menggunakan dua pendekatan, yaitu tabel distribusi frekuensi dan Uji *Fisher Exact*. Tabel distribusi frekuensi digunakan untuk menyajikan data mentah yang kemudian disusun dalam bentuk kelompok-kelompok data. Uji *Fisher Exact* digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel kecil independen (data nominal) (Sugiyono, 2002). Dalam penelitian ini, Uji *Fisher Exact* digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan persepsi masyarakat tentang pelayanan publik bidang pendidikan sebelum dan setelah pelaksanaan otonomi daerah. Uji ini dilakukan berdasarkan pada persepsi yang terwujud dalam kuesioner dengan 2 (dua) pilihan jawaban: “meningkat” dengan bobot 1 dan “tidak meningkat” dengan bobot -1. Pengolahan data menggunakan SPSS 16.0. Pada Gambar 1 menjelaskan tahap-tahap pengujian hipotesis pada Uji *Fisher Exact*.

Pengambilan keputusan untuk menyimpulkan apakah terdapat keterkaitan persepsi masyarakat di pusat dan pinggiran kota tentang pelayanan publik bidang pen-



Gambar 1. Tahap-Tahap Uji *Fisher Exact*

didikan di Kota Tangerang perlu dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : tidak terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat di pusat dan pinggiran kota tentang kinerja pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Tangerang baik sebelum maupun setelah pelaksanaan otonomi daerah.

H_1 : terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat di pusat dan pinggiran kota tentang kinerja pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Tangerang baik sebelum maupun setelah pelaksanaan otonomi daerah

Hasil Penelitian dan Pembahasan

UU. No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Melihat definisi di atas, maka pelayanan publik bidang pendidikan adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bidang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Pemerintah Daerah) dengan standar (1) berkualitas; (2) cepat; (3) mudah; (4) terjangkau; dan (5) terukur. Ukuran atau barometer (*indicators*) standar pelayanan minimum (SPM) bidang pendidikan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) efisiensi; (2) keefektifan; (3) keadilan; dan (4) daya tanggap.

Kemudian, masing-masing indikator di-*breakdown* menjadi rumusan pernyataan

yang harus dijawab oleh responden. Distribusi frekuensi persepsi responden tentang pelayanan publik bidang pendidikan setelah pelaksanaan otonomi secara umum dinilai mengalami peningkatan. Di samping itu, hasil analisis tabel silang dengan menggunakan Uji *Exact Fisher* ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat di pusat dan pinggiran kota tentang kinerja pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Tangerang. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat baik di pusat kota maupun di pinggiran kota adalah sama.

Upaya pembagian “pusat” dan “pinggiran” sebenarnya hanya bersifat hipotetis, mengingat secara istilah administratif-kewilayahan Kota Tangerang telah disebut sebagai “Kota”. Hal ini digunakan dengan tujuan penyederhanaan model dalam rangka menggambarkan fenomena dunia nyata yang kompleks. Dalam penyusunan organisasi spasial dari aktivitas ekonomi, seringkali diperlukan penyusunan berbagai asumsi untuk memusatkan perhatian pada aspek-aspek lokasional. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat dua kategori asumsi dalam model lokasi, yaitu (1) berhubungan dengan permukaan tanah (*land surface*) dan karakteristiknya serta (2) berhubungan dengan kehidupan penduduk pada permukaan lahan tersebut (Rustiadi, 2007). Berdasarkan pada penyederhanaan itu, maka teori “pusat” dan “pinggiran” pada akhirnya digunakan dalam penelitian ini. Pusat identik dengan “kota”, sementara pinggiran (*periphery*) identik dengan wilayah di pinggir “kota”. Secara teoritik, aktivitas pada kedua wilayah ini memiliki karakternya masing-masing. Wilayah pusat umumnya adalah pusat pemerintahan, ekonomi, dan pelayanan. Sementara wilayah pinggir adalah wilayah yang menerima pelayanan dari

pusat dan aktivitas ekonominya didominasi oleh sektor pertanian.

Pembagian wilayah “pusat” dan “pinggir” secara hipotetis ini juga didasari oleh adanya *backwash effect* akibat dari adanya akumulasi manfaat terlalu besar yang diterima oleh pusat. Akibatnya perdesaan yang notabene “pinggir” kota terjebak terlalu terspesialisasi pada satu komoditas pertanian atau sumberdaya alam untuk melayani perkotaan (Amstrong dan McGee, 1985 dalam Rustiadi, 2007). Hasil olah data dalam penelitian ini tampaknya mem-

buktikan bahwa tidak terjadi dikotomi “pusat” dan “pinggir” dilihat dari perspektif pelayanan publik khususnya bidang pendidikan di Kota Tangerang. Jika mengacu pada pemahaman bahwa kota dicirikan oleh aktivitas ekonomi utama seperti industri dan manufaktur, maka sesungguhnya penyebaran sektor industri di Kota Tangerang telah merata di hampir semua kecamatan. Sebaran industri di Kota Tangerang sampai dengan Bulan Juni 2008 dapat dilihat pada tabel 1.

Melihat struktur ekonomi Kota

Tabel 1. Sebaran Industri di Kota Tangerang Sampai Bulan Juni 2008

Kecamatan	AI	IUI	TDI	JML	PMA	PMDN	JML
Batuceper	64	54	109	227	28	35	63
Benda	18	17	52	87	7	3	10
Cibodas	37	43	98	178	14	14	28
Ciledug	0	1	35	36	0	1	1
Cipondoh	7	7	331	345	3	1	4
Karawaci	38	41	152	231	17	14	31
Karangtengah	0	3	43	46	0	0	0
Larangan	1	4	39	44	1	0	1
Neglasari	12	23	93	128	7	3	10
Pinang	2	4	58	64	3	1	4
Tangerang	9	11	105	125	11	3	14
Periuk	43	70	120	233	3	6	9
a. Gebang Raya	3	3	18	24	1	1	2
b. Gembor	1	17	18	46	2	4	6
c. Periuk	8	16	31	55	0	0	0
d. Periuk Jaya	19	24	26	69	0	0	0
e. Sangiang Jaya	2	10	27	39	0	1	1
Jatiuwung	134	77	75	286	108	65	173
a. Alam Jaya	8	9	5	22	0	4	10
b. Gandasari	19	8	3	30	12	16	28
c. Jatake	17	9	12	38	17	4	21
d. Keroncong	18	11	15	44	15	10	25
e. Manis Jaya	26	14	15	55	25	8	33
f. Pasir Jaya	46	26	25	97	33	23	56
Jumlah	365	355	1,310	2,030	202	146	348

Sumber: Dinas Perindagkopar Kota Tangerang

Keterangan:

AI : Industri Besar

IUI : Industri Menengah

TDI : Industri Kecil

PMA : Permodalan Asing

PMDN : Permodalan Dalam Negeri

Tangerang demikian, maka menjadi logislah persepsi masyarakat tentang pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan masyarakat telah menerima pelayanan yang merata, khususnya dalam bidang pendidikan. Kesamaan persepsi ini tampaknya terkait dengan apa yang dirasakan dan dialami oleh masyarakat di Kota Tangerang.

Menurut publikasi situs internet Pemerintah Kota Tangerang, sejumlah program seperti alokasi dana pendidikan sebesar 37,37% yang diperuntukkan untuk meningkatkan urusan wajib bidang pendidikan di Kota Tangerang melalui program pembangunan sarana pendidikan, pemberian beasiswa, peningkatan kualitas pendidikan baik siswa maupun para pengajar serta insentif untuk seluruh guru baik negeri maupun swasta seluruh tingkatan sebesar Rp 350.000,-/bulan (www.infotangerang.go.id). Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang melakukan pembangunan 400 Gedung Sekolah bertingkat berikut meja dan kursi, serta kamar mandi/WC, penyediaan seragam sekolah SMP rok dan celana panjang; pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan pemberian Insentif Guru Negeri/Swasta/MTs setiap bulan.

Kemajuan ini juga didukung oleh penyelenggara pendidikan dari pihak swasta. Artinya, pihak swasta juga turut berperan dalam meningkatkan IPM di Kota Tangerang. Secara empirik, penyelenggaraan pendidikan lebih banyak dijalankan oleh institusi swasta ketimbang pemerintah. Namun demikian, diperlukan peran yang lebih nyata dari pemerintah Kota Tangerang untuk dapat memberikan infrastruktur pendidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Tabel 2. Komposisi Jumlah Sekolah Pemerintah-Swasta di Kota Tangerang

Tingkat	Sekolah Pemerintah	Sekolah Swasta	Total Sekolah
TK	1	234	235
SD	377	92	469
SMP	21	122	143
SMA	14	55	69
Perguruan Tinggi	-	8	8

Sumber: www.infotangerang.com

Berkaitan dengan hasil distribusi frekuensi persepsi, terdapat satu aspek yang dianggap belum memuaskan oleh responden, yaitu mengenai keselarasan antara program yang disampaikan dengan penerapan programnya di lapangan. Responden menilai bahwa keselarasan antara program yang disampaikan dengan penerapan programnya setelah otonomi daerah belum meningkat. Persepsi ini muncul tampaknya berkaitan dengan ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan publik bidang pendidikan. Munculnya ekspektasi ini tentu terkait pula dengan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan walikota. Janji yang disampaikan adalah sekolah gratis sampai dengan tingkat SMP. Untuk memenuhi janji ini, tentu belanja publik harus ditingkatkan. Namun demikian, belanja ini juga terkait dengan keterbatasan anggaran yang ada.

Penutup

Analisis persepsi masyarakat di pusat dan pinggiran kota tentang pelayanan publik bidang pendidikan menghasilkan simpulan

bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat di pusat dan pinggiran kota tentang kinerja pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Tangerang. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat baik di pusat kota maupun di pinggiran kota secara rata-rata adalah sama. Menurut penilaian responden, kuantitas dan kualitas pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Tangerang telah dilaksanakan secara efektif, efisien, berdaya tanggap dan berkeadilan setelah pelaksanaan otonomi daerah.

Meskipun persepsi publik tentang pelayanan publik bidang pendidikan telah merata, kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dan masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan terhadap pendidikan menjadi penting untuk dilaksanakan. Formulasi program Kartu Multi Guna (KMG) telah dipandang efektif selama pelaksanaan satu tahun ini. Namun demikian, program itu juga perlu dievaluasi *outcome*-nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Arifin, B., 2006. "Refleksi Strategi Pengentasan Kemiskinan". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik*. Vol. 7 (4) Oktober 2006.
- Badan Pusat Statistik, 2010. *Hasil Sensus Penduduk 2010 Data Agregat per Kecamatan Kota Tangerang*. Kota Tangerang.
- Burchi, F., 2006. "Education, Human Development and Food Security in Rural Areas: Assessing Causalities". *Paper for the 2006 International Conference of the Human Development and Capability Approach*. Groningen. 29 August-1 September.
- Bappenas dan UNDP, 2008. "Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007". *Building and Reinventing Decentralized Governance (BRIDGE)*, Jakarta.
- Elmi, B. 2005. "Studi Penanggulangan Kemiskinan (Poverty Reduction) di Propinsi Kalimantan Selatan". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 9. No. 3. September 2005.
- Hernawan, D. 2007. "Kajian Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pemerataan Keuangan Daerah dan Kinerja Pembangunan (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten)". *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Morrison, C. 2002. *Health, Educations and Poverty Reduction*, Policy Brief No. 19. OECD Development Center.
- Juanda, B. 2007. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. IPB Press. Bogor.
- Lewis, D. 2001. *The Indonesian Equalisation Transfer*, *Bull of Indonesia Economic Studies*. Vol. 37. No. 3. Desember.
- Nanga, M. 2006. "Dampak Transfer Fiskal Terhadap Kemiskinan di Indonesia: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan". *Dissertasi*. Program Studi Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor
- Pakkanna, M. 2006. "Analisis Kegiatan Ekonomi Masyarakat Squatter Kota Tangerang". *Jurnal Liquidity*. Vol. 1, No. 1. Desember 2006

- Rozi, M.F. 2007. "Dampak Otonomi Daerah Terhadap Pengurangan Kemiskinan: Kasus Provinsi Riau". *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Rustiadi, E. 2007. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Diklat Kuliaah, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Siregar, R.Y. 2001. *Survey of Recent Developments, Bull of Indonesia Economic Studies*. Vol. 37. No. 3. Desember.
- Sugiyono. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung
- Suryadarma, D., dan Surhayadi, A. 2009. *The Contrasting Role of Ability and Poverty on Education Attainment: Evidence from Indonesia*. Working Paper. SMERU Research Institute.
- Suryoatmono, B. 2005. *Statistika Nonparametrik dan Penerapannya Dalam Penelitian Manajemen*. Pelatihan Metode Penelitian. Fakultas Ekonomi Unpar. Bandung.
- Toyamah, N., et. Al. 2002. *Dampak Desentralisasi dan Otonomi Daerah Atas Kinerja Pelayanan Publik: Kasus Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung*, SMERU Research Institute.
- Usman, 2005. "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan". *Tesis*. Program Studi Ekonomi Pertanian. Program Studi Ekonomi Pertanian. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Wilopo dan Budiono. 2007. "Desentralisasi Ekonomi dan Pelayanan Publik: Studi di Kabupaten/Kota Jawa Timur Periode 2002-2004". *Jurnal Ekonomi Indonesia*. No. 2 Desember 2007.
- World Bank, 2006. *Making the New Indonesia Work for the Poor*, Washington D.C, USA.
-, 2009. *Investing in Indonesia's Education at the District Level An Analysis of Regional Public Expenditure and Financial Management*, Washington D.C. USA

